



Dasar Berlakunya Hukum Adat

oleh:

Joeni Arianto Kurniawan

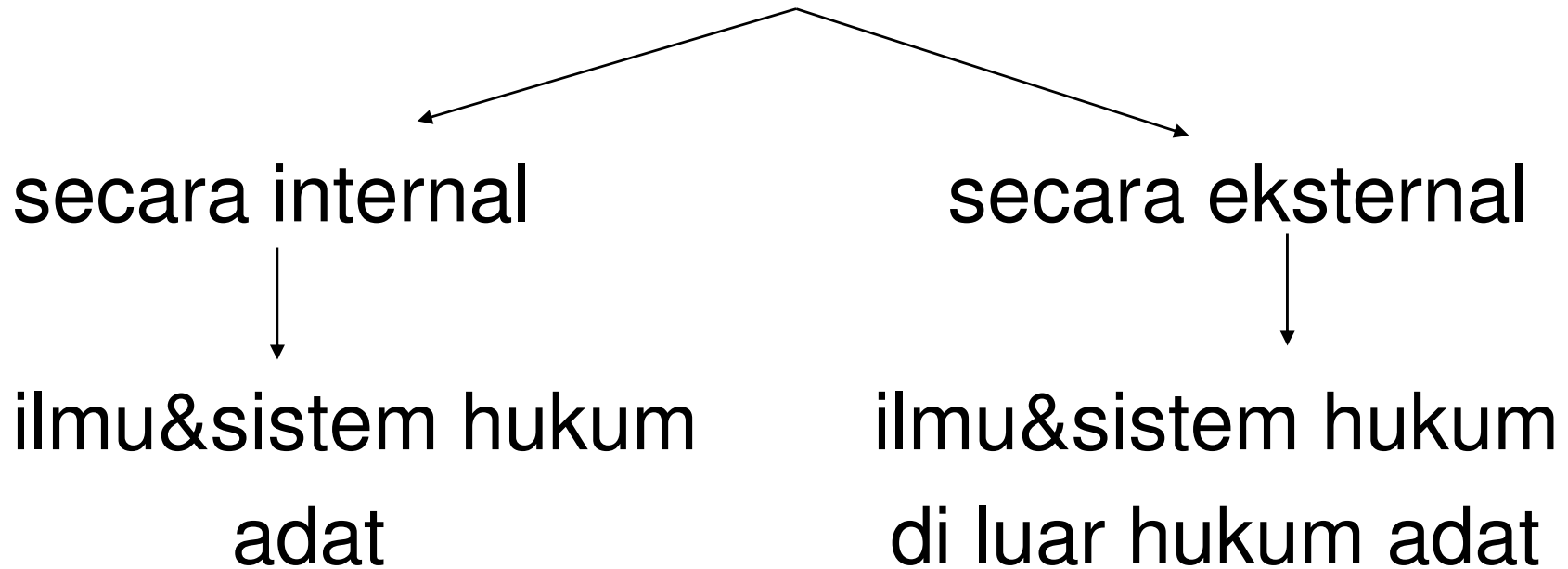
Dasar Berlakunya Hukum Adat
Joeni Arianto Kurniawan



3 Macam keberlakuan hukum:

1. Secara yuridis-formil
2. Secara empiris / sosiologis / faktual
3. Secara filosofis

2 sudut pandang keberlakuan hukum adat





Secara internal

→ Memberlakukan hk adat menurut sistem hk.adat:

- Keberlakuan secara faktual

→ 2 unsur dalam keberlakuan hukum adat (Soerojo 1979):

a. kenyataan

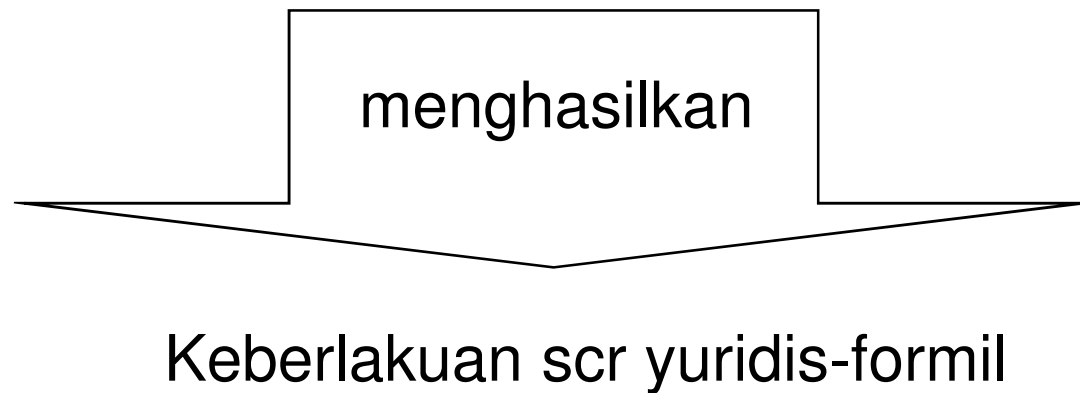
b. psikologis → konsep hk. Adat menurut Bellefroid

- Keberlakuan secara filosofis

→ hukum adat bersumber langsung dari nilai-nilai & pandangan hidup masyarakat nilai-

Secara Eksternal

- Memberlakukan hk.adat mlil sistem hk di luar hk.adat
- selain secara faktual dan filosofis, keberlakuan hukum adat juga harus ditopang atau dipayungi oleh suatu hukum positif (legalisasi keberlakuan hukum adat dlm suatu peraturan per-UU-an)



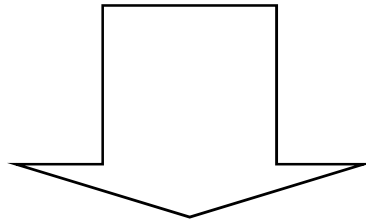


Keberlakuan Hukum Adat Secara Yuridis-Formil

- Dapat ditinjau dalam lintasan sejarah
 1. Jaman penjajahan
 - a. era VOC
----- revolusi Perancis
 - b. era kolonial
 2. Era kemerdekaan

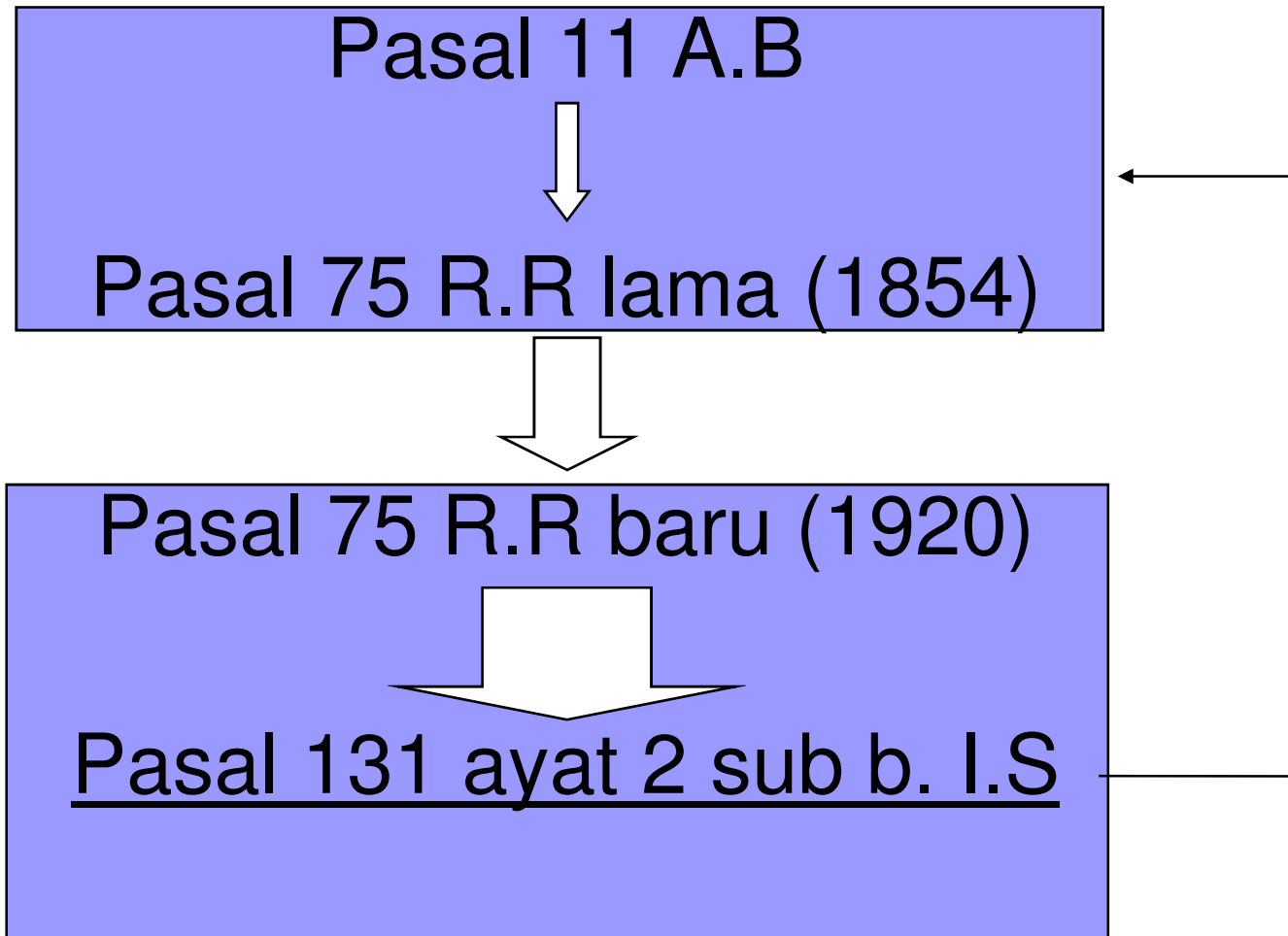
Era Pemerintahan Kolonial Belanda

- Adanya semangat liberalisme → semangat *Bewuste Rechtspolitik*



- Pembentukan peraturan per-UU-an di tanah jajahan → A.B

Pengaturan ttg Hkm Adat dlm Era Kolonial:



Era Kemerdekaan

- **UUD 1945:**

- Pasal II AP → pasal 131 I.S

- **Konstitusi RIS:**

- Pasal 192(1) → pasal 131 I.S

- Pasal 146(1)

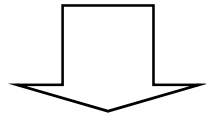
- **UUDS 1950:**

- Pasal 104(1)

- Pasal 142 → pasal 131 I.S



- Dekrit 5 Juli 1959



- UUD 1945

 - pasal II AP → pasal 131 I.S

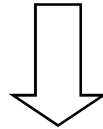
- UUD 1945 Amandemen

 - pasal I AP → pasal 131 I.S

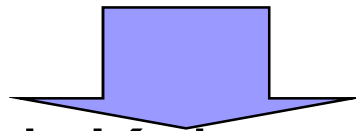
 - pasal 18B(2)

Pengaturan ttg Hukum Adat di peraturan per-UU-an lain:

Pasal 146(1) Konstitusi RIS



Pasal 104 (1) UUDS 1950



- UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman:
pasal 17 UU 19/64 jo pasal 23(1) UU
14/70 jo pasal 25(1) UU 4/04



- UUPA:

- Pasal 5:

- “Hukum agraria yg berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa **adalah hukum adat**, sepanjang tdk bertentangan dg kep.nasional dan negara, yg berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dg peraturan-peraturan yg tercantum dlm UU ini dan dg peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dg mengindahkan unsur-unsur yg berdasarkan pd hukum agama.



-Pasal 2(4) :

→ mengatur tentang pelimpahan kembali wewenang kepada masyarakat adat utk melaksanakan hak menguasai atas tanah


-Pasal 3:

→ mengatur pelaksanaan hak ulayat



- UU No1 Th 1974 (UU Perkawinan)

- Pasal 35 & pasal 36 :

- pengaturan ttg harta bersama dan harta bawaan  resepsi konsep hukum adat

Sekian & Terima Kasih

“Menuju Revolusi Bangsa Indonesia”